

UMKM: WUJUD KEMANDIRIAN EKONOMI PEREMPUAN MENUJU PEREKONOMIAN GLOBAL

Refthi Handini Listyani

Prodi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya
refthihandini@unesa.ac.id

Ika Kharisma

Jurusan Manajemen, Universitas Bhayangkara Surabaya
ika.rahma36@gmail.com

Abstract

Entering the global economy, women in Indonesia still have to bear the burden of the economy in their household even a country. Moreover, they get inequality fee in their job. It means that men get more than women. However, on the other side, the role of women in a family and national economy is one of the important parts in the whole construction along with the increasing of women's income. It is pointed by the presence of women entrepreneurs in micro, Small and Medium Enterprises (SME/UMKM) which becomes reality economic life in a considerable part of Indonesian people.

Keywords: *Woman, UMKM, Independent, Economy, Global.*

Pendahuluan

Ekonomi dunia telah mengalami revolusi hanya dalam jangka waktu seratus lima puluh tahun. Beberapa dekade pasca Perang Dunia II merupakan periode perluasan perusahaan nasional ke pasar global. Dua dekade yang lalu, istilah pemasaran global bahkan belum diciptakan. Sekarang, pemasaran global merupakan hal yang amat penting, bukan hanya untuk merealisasikan potensi sukses sepenuhnya dari sebuah bisnis, tetapi bahkan demi kelangsungan hidup sebuah bisnis. Sebuah perusahaan yang gagal untuk merambah pasar global akan menghadapi bahaya kehilangan pasar domestik dari pesaingnya, global corporations yang mempunyai biaya lebih

rendah, mempunyai pengalaman lebih banyak, memproduksi barang lebih baik dan secara keseluruhan, lebih berharga di mata konsumen.¹

Heryanto² menyatakan bahwa dalam perekonomian global, sebuah “pulau baru” yang lebih besar dari benua telah muncul, yaitu *Interlinked Economy* (ILE) atau ekonomi yang saling mengait dari Triad: Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Kemudian diikuti oleh Taiwan, Hong Kong dan Singapura. “Pulau” ini menjadi begitu kuat sehingga menelan sebagian besar konsumen, membuat perbatasan nasional yang tradisional hampir lenyap. ILE memiliki badan tetap yang terdiri dari sekitar 1 miliar orang, yang menikmati rata-rata \$ 10,000 per kapita Produk Nasional Bruto (Gross National Product). Di dalam ILE inilah sebagian besar kekayaan di dunia diciptakan, dikonsumsi dan didistribusi ulang.

Ali³ menjelaskan bahwa, dalam era globalisasi, perempuan pedesaan juga pergi untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini sejalan dengan SAPs di mana komoditi yang diekspor tidak hanya barang. Jasa pun diekspor, termasuk sumber daya manusia dalam sektor informal atomistik sebagai pembantu rumah tangga. Ketika kerja di sektor pertanian tidak memberikan peluang lagi, dengan keterbatasan pendidikan maka pilihan perempuan di pedesaan adalah memenuhi kebutuhan negara lain dan menjadi tenaga kerja domestik. Kontribusi ekspor Buruh Migran untuk mengurangi masalah pengangguran tidak dapat dipungkiri. Pada tingkat makro, sumbangan mereka pada devisa negara tentu sangat membantu. Sementara itu sumbangan di tingkat mikro baik pada keluarga maupun pada masyarakat jelas sangat bermakna. Namun kaum perempuan yang menjadi buruh migran tersebut harus menanggung beban finansial, fisik dan psikologis.

Faktanya, ditemukan dalam keseluruhan proses dari tahap registrasi, pemberangkatan, di tempat kerja, dan ketika pulang kembali ke rumah mereka mengalami perlakuan rendah, pelecehan seksual, tindakan kekerasan dan eksploitasi. Berbagai peraturan dalam rangka memproteksi mereka be-

¹Lihat secara detil W. J. Keegan, *Manajemen Pemasaran Global* (Jakarta: Prenhallindo, 1974).

²Januar Heryanto, “Pro dan Kontra Ekonomi Global”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 6. No. 2. September 2004. <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>.

³Moh. Ali, “Peranan Perempuan dalam Ekonomi Global: Refleksi terhadap Gerakan Gender di Indonesia”, *Musawa*, Vol. 1. No. 2. Desember 2009.

lum dilaksanakan, sementara perlindungan sosial belum menjangkau kelompok buruh migran. Akhirnya, kaum perempuan yang harus menanggung beban pembangunan ekonomi rumah tangga bahkan sebuah negara. Sedangkan pola yang digunakan negara dalam penyelesaian problem sosial seperti; pengangguran selalu sama yaitu dengan pengiriman Buruh Migran Indonesia. Sehingga yang terjadi pemiskinan secara struktural kaum perempuan di pedesaan.⁴

Ketimpangan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi

Mengutip Harahap, *The Global Gender Gap Report 2013* mengemukakan bahwa Indonesia berada di peringkat 95 dari 136 negara dengan skor sebesar 66,13. Dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, Filipina (peringkat 5), Singapura (peringkat 58), Thailand (peringkat 65), Vietnam (peringkat 73) dan Brunei Darussalam (peringkat 88) berada di atas Indonesia.⁵

Sandee, et.al. (2002) dalam SMERU⁶ mengungkapkan bahwa upah perempuan lebih rendah dari laki-laki, yakni sekitar 70% dari upah laki-laki. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa jika dilihat dari akses terhadap kredit, pengusaha perempuan diperkirakan mempunyai akses yang lebih kecil 11%, dibandingkan laki-laki 14%. Mengingat porsi perempuan dalam usaha mikro cukup menonjol, maka peningkatan ekonomi perempuan dilakukan antara lain melalui upaya berupa program, atau kegiatan penguatan usaha mikro. Upaya ini telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, lembaga swasta, lembaga perbankan, lembaga donor, maupun lembaga atau individu lain. Namun demikian hingga kini sulit memastikan seberapa banyak upaya yang telah dilakukan karena informasi yang tersedia terbatas.

Mengutip tulisan Widayanti, dkk., Martin dan Garvi (2009) mengemu-

⁴ Moh. Ali, "Peranan Perempuan.... 2009.

⁵Harahap, *Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. (Semarang: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. 2014)

⁶Kerjasama Lembaga Penelitian SMERU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Buku II: *Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan*, http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/buku_2_usaha_mikro_edited_0.pdf (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya, Makassar) Desember 2003.

kakan bahwa pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) menstimulasi peningkatan nilai *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Index* (HDI) serta menurunkan kesenjangan antar kedua indeks tersebut. Klasen dan Lamanna (2009) juga menghitung konsekuensi secara kuantitatif yang harus ditanggung oleh sebuah negara ketika terdapat ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan dinegaranya yaitu perbedaan laju pertumbuhan ekonomi berkisar antara 0,9-1,7% di Timur Tengah dan Afrika Utara serta 0,1-1,6% di Asia Selatan bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Di Indonesia, Samosir & Toersilaningsih (2004) mengungkapkan bahwa keterkaitan antara kesetaraan gender secara statistik menunjukkan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga diutarakan oleh Haas (2005) bahwa GDP berpengaruh negatif terhadap kesenjangan upah gender.⁷

Todaro dan Smith (2006) dalam Harahap⁸ mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan perubahan besar, antara lain perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Hubungan ketimpangan gender dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak menjadi objek penelitian di berbagai negara. Laporan World Bank (2005) menyatakan bahwa biaya disparitas gender tinggi, karena disparitas gender tidak hanya mengurangi kesejahteraan perempuan, tetapi juga mengurangi kesejahteraan laki-laki dan anak-anak dan menghalangi pembangunan ekonomi.

Faktor-faktor seperti pencapaian pendidikan, pengalaman kerja, pilihan industri dan pengerjaan mempengaruhi perbedaan dalam kesetaraan upah antar gender. Namun terkadang diskriminasi juga ikut memainkan peran dalam hal kesenjangan upah gender, hal ini juga diungkapkan oleh International Labor Organization Report tahun 2012 bahwa secara keseluruhan

⁷Widayanti, dkk. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender. *Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5 (Oktober 2013)

⁸Harahap, Rahmi Fuji Astuti, Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, 2014.

kesenjangan upah gender terkait dengan diskriminasi gender (Blau and Kahn, 2000). Hasil tersebut terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aktaria dan Handoko⁹ yaitu kesenjangan gender memperlihatkan hasil negatif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Seguino (2008) dalam Harahap¹¹ menyatakan beberapa argumentasi yang menjelaskan ketimpangan gender dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Kesenjangan gender dalam pendidikan akan mengurangi jumlah rata-rata modal manusia dalam masyarakat. Kesenjangan ini menghalangi bakat-bakat yang memiliki kualifikasi tinggi yang terdapat pada anak perempuan yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengembalian investasi sektor pendidikan.
2. Adanya eksternalitas dari pendidikan kaum wanita bagi penurunan tingkat fertilitas, tingkat kematian anak, dan mendorong pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Penurunan fertilitas memberikan eksternalitas positif bagi penurunan angka beban ketergantungan dalam angkatan kerja.
3. Pemerataan kesempatan dalam sektor pendidikan dan pekerjaan bagi setiap gender memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu negara dalam perdagangan internasional.
4. Bekal pendidikan dan kesempatan kerja di sektor formal yang lebih besar bagi kaum wanita akan meningkatkan *bargaining power* mereka dalam keluarga. Hal ini penting karena terdapat perbedaan pola antara perempuan dan laki-laki dalam perilaku menabung dan investasi ekonomi baik non ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan anak yang akan meningkatkan modal manusia generasi mendatang dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

⁹Aktaria, dkk., "Ketimpangan Gender dalam Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 13 No. 2. 2012..

¹⁰Widayanti, dkk. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender", *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, Vol. 5 Oktober 2013 Bandung, 8-9 Oktober 2013. ISSN: 1858-2559.

¹¹Harahap, Rahmi Fuji Astuti, Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, 2014.

Sebagaimana diungkapkan oleh Widayanti, dkk.,¹² secara umum kesenjangan antar upah gender dipengaruhi oleh kemajuan suatu negara. Negara yang maju akan selalu memperhatikan masalah kesejahteraan bagi tiap warganya, salah satunya dalam bentuk kesetaraan upah. Untuk sebagian negara, kesenjangan upah masih terjadi, hal ini disebabkan oleh budaya dari beberapa negara tersebut yang menganggap bahwa perempuan cenderung kurang mempunyai pengalaman kerja dibanding laki-laki dan perempuan akan lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk pekerjaan rumah yang mengakibatkan tidak dapat mengendalikan jam kerja mereka dan mengurangi produktivitasnya saat bekerja.

Menurut Harahap,¹³ rendahnya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan *human capital* perempuan rendah dan rendahnya kualitas pelayanan untuk anak, serta percepatan penyebaran HIV. Berdasarkan laporan, diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja dan akses terhadap sumber daya menyebabkan terjadi inefisiensi dalam alokasi input dan hilangnya *output*.

Peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan cenderung akan mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, kesehatan dan gizi. Daya produktivitas yang meningkat dan lapangan kerja baru seringkali mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan dan investasi pada infrastruktur juga dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan gender. Dirangkum dari laporan pembangunan dan perspektif gender (World Bank, 2000) disebutkan bahwa dibutuhkan institusi yang memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, serta dibutuhkan juga langkah-langkah kebijakan untuk menangani kesenjangan gender yang masih menjadi permasalahan dalam suatu negara.¹⁴

¹²Widayanti, dkk. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender", *Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Vol. 5 Oktober 2013 Bandung, 8-9 Oktober 2013. ISSN: 1858-2559.

¹³Harahap, Rahmi Fuji Astuti, Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, 2014.

¹⁴Widayanti, dkk. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender", *Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Vol. 5 Oktober 2013 Bandung, 8-9 Oktober 2013. ISSN: 1858-2559.

Fakta Mengenai Wirausaha Perempuan

Kaum wanita ikut memiliki peran yang besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Berdasarkan studi terbaru yang dilakukan oleh *Asia Foundation*, menunjukkan bahwa sekitar 23 persen adalah pengusaha wanita. Jumlahnya, tumbuh 8 persen setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, jumlah pengusaha perempuan lebih banyak berada dalam skala mikro dan kecil. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2015 tercatat, dari sekitar 52 juta pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60 persen usaha dijalankan oleh perempuan.¹⁵

Keterlibatan perempuan dalam wirausaha, menjadi kajian beberapa peneliti, di antaranya Ardhanari,¹⁶ yang meneliti profil dan hambatan wirausaha perempuan di Indonesia untuk berkembang. Temuannya sangat menarik karena disebutkan hambatan wirausaha perempuan adalah karakteristik personal yang diakibatkan oleh beban kerja akibat peran ganda seorang perempuan dan karakteristik struktural, yaitu hambatan terhadap akses permodalan (syarat dan agunan) dan akses pemasaran di mana perempuan memiliki akses informasi pemasaran yang rendah. Disimpulkan bahwa hambatan perkembangan wirausaha perempuan adalah akibat *gender stereotype* (stereotip gender) antara perempuan dan laki-laki dalam lingkungan patriarki.¹⁷

Dinamika perkembangan wirausaha dalam suatu negara tidak lepas dari partisipasi dan peran perempuan. Minniti, et al. (2005) dalam Widowati,¹⁸ menemukan bahwa partisipasi perempuan sebagai wirausaha meningkat cukup tajam selama satu dekade terakhir dan ternyata makin signifikan baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang. Meski demikian, pertumbuhan jumlah perempuan pemilik usaha (*women-owned business*) secara

¹⁵Republika, Jumlah Pengusaha UMKM Perempuan Meningkat (2015), diakses pada tanggal 01 Maret 2016. (<http://www.smartbisnis.co.id/content/read/berita-bisnis/umum/jumlah-pengusaha-umkm-perempuan-meningkat>).

¹⁶Ardhanari, dkk. "Analisis Personal dan Struktural PUMIK (Perempuan Pengusaha Mikro) di Surabaya dalam Upaya Pengembangan Keberhasilan Usaha Bidang Ritel, *Makalah* disampaikan pada Lokakarya Regional: Pengembangan Kewirausahaan Perempuan dalam Usaha Mikro & Kecil, Bali, 29-30 November 2007.

¹⁷Widowati, Indah, Peran Perempuan dalam Mengembangkan *Entrepreneur/Wirausaha*: Kasus di KUB (*Joint Business Group*) Maju Makmur Kec. Kejajar kab. Wonosobo, 2012..

¹⁸Widowati, Indah, Peran Perempuan dalam Mengembangkan *Entrepreneur/Wirausaha*: Kasus di KUB (*Joint Business Group*) Maju Makmur Kec. Kejajar kab. Wonosobo, 2012.

sistematis tetap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Apabila kita telaah, perempuan sebenarnya memiliki peluang sebagai wirausaha, antara lain:

1. Perempuan lebih fleksibel menyeimbangkan kebutuhan pendapatan dan tugas tradisional sebagai perempuan
2. Perempuan memiliki kebutuhan dan keinginan yang spesifik dalam siklus hidup mereka
3. Produk komsumtif terbesar adalah produk yang dipahami oleh kaum perempuan
4. Komunitas Perempuan sebagai segmen pasar yang spesifik dan unik

Partisipasi perempuan dalam kegiatan untuk pendirian usaha juga lebih rendah, di mana laki-laki dua kali lipat frekuensinya dibandingkan dengan kaum perempuan. Proporsi tersebut makin buruk pada negara-negara berkembang, karena partisipasi laki-laki hampir mencapai 75% (Minniti dan Arenius, 2003, dalam Widowati).¹⁹ Ketimpangan tersebut di atas didukung oleh Wilson (2007) dalam Widowati,²⁰ yang menyatakan bahwa kepemilikan perempuan terhadap usaha di Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin hanya 25%, sedangkan sisanya dimiliki oleh laki-laki. Padahal wirausaha perempuan memiliki kekuatan sebagai berikut:

1. *Multitasking*, dapat mengerjakan berbagai hal secara bersamaan
2. Organisatoris / manajer yang handal, perempuan mengelola ekonomi rumah tangga sepanjang hidup
3. Telaten, 70% kesuksesan berwirausaha ditentukan oleh kecerdasan emosi.
4. *Networking*, kemampuan menjaga hubungan yang baik
5. Negosiator yang handal
6. Memiliki rasa sensitif dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan lelaki

Mengutip tulisan yang berjudul “*Wirausaha Perempuan Peluang dan Tan-*

¹⁹Widowati, Indah, Peran Perempuan dalam Mengembangkan *Entrepreneur/Wirausaha*: Kasus di KUB (*Joint Business Group*) Maju Makmur Kec. Kejajar kab. Wonosobo, 2012.

²⁰Widowati, Indah, Peran Perempuan dalam Mengembangkan *Entrepreneur/Wirausaha*: Kasus di KUB (*Joint Business Group*) Maju Makmur Kec. Kejajar kab. Wonosobo, 2012.

tangganya” dalam lokakarya Mampu Fase 2 (2013), perempuan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan membangun kewirausahaan di Indonesia 60% usaha kecil dan mikro di Indonesia dimotori perempuan yang paling bertahan dari krisis moneter, ekonomi, pangan, dan energi yang menimpa dunia dan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Usaha mikro yang dijalankan oleh perempuan berpotensi menciptakan alternatif pendapatan bagi keluarga dan berperan sebagai manajer dalam mengelola ekonomi keluarga.

Lebih lanjut tulisan di atas mengemukakan beberapa tantangan wirausaha perempuan, antara lain sebagai berikut:

1. Konstruksi Sosial dan Budaya
Peran perempuan hanya sebatas di lingkup domestik yaitu mengurus rumah dan keluarga, lebih banyak menghadapi tekanan sosial.
2. Akses Pendidikan (berwirausaha) rendah
Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil tingkat partisipasi perempuan, termaksud didalamnya akses pelatihan kewirausahaan.
3. Akses layanan pinjaman rendah
Lebih banyak menggunakan modal tabungan sendiri.

Mengutip hasil penelitian Wilson et al. (2007) yang menekankan pada faktor personal (*personality characteristic*), yaitu *self-efficacy*, Widowati²¹ mengungkapkan bahwa kaum perempuan memiliki *self-efficacy* dan *self-confidence* yang lebih rendah dari kaum laki-laki di bidang matematika, keuangan, pembuatan keputusan, dan *problem solving*. Padahal hal ini adalah faktor utama yang berhubungan dengan keterampilan dan keahlian laki-laki dan bahkan menjadi determinan dalam mendorong kesuksesan sebagai seorang wirausaha. Selaras dengan Kickkul et al. (2004) dalam Widowati²² yang menyatakan bahwa *self-efficacy* kaum laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Padahal, *self-efficacy* ini menjadi faktor penting bagi wirausaha dalam mengembangkan dan menguasai *skill* yang dibutuhkan dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kesuksesan karir. Terkait hambatan tersebut di atas, terdapat be-

²¹Widowati, Indah, Peran Perempuan dalam Mengembangkan *Entrepreneur/Wirausaha*: Kasus di KUB (*Joint Business Group*) Maju Makmur Kec. Kejajar kab. Wonosobo, 2012.

²²Widowati, Indah, Peran Perempuan dalam Mengembangkan *Entrepreneur/Wirausaha*: Kasus di KUB (*Joint Business Group*) Maju Makmur Kec. Kejajar kab. Wonosobo, 2012.

berapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun wirausaha perempuan, yakni:

1. Mendorong komunitas perempuan agar memiliki kekuatan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup untuk keluarga mereka dalam bentuk kegiatan berbisnis (ekonomi) yang kemudian secara berlahan akan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial, pendidikan, budaya dan politik.
2. Menyelenggarakan proses pemberdayaan yang lebih menekankan pada cara berpikir mengoptimalkan sumber daya dan proses bekerja sama dalam komunitas perempuan sebagai aktor utamanya di dalam suatu tahapan kegiatan sebagai berikut (Bina Mitra Usaha Nusantara, 2013):
 - a) Fasilitasi memetakan potensi dan peluang komunitas perempuan
 - b) Fasilitasi penguatan kelompok
 - c) Fasilitasi penguatan kapasitas individu
 - d) Fasilitasi penguatan kolaborasi atau kerjasama
 - e) Fasilitasi terhadap akses layanan bisnis

Hasil penelitian PPEP (Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa proporsi tenaga kerja perempuan di sektor informal mencakup 70% dari keseluruhan tenaga kerja perempuan. Besar-besarnya kaum perempuan yang bekerja di sektor informal memunculkan dua indikasi. *Pertama*, masih banyak dijumpai adanya keterbatasan-keterbatasan akses kaum perempuan untuk masuk ke dalam sektor formal walaupun kebijakan kesetaraan gender telah lama dilaksanakan. *Kedua*, kaum perempuan sendiri yang lebih memilih masuk ke sektor informal, dengan pertimbangan (di luar pertimbangan ekonomi) adanya kemudahan, keleluasaan, dan fleksibilitas kerja di sektor informal yang tidak mungkin diperolehnya ketika bekerja di sektor formal. Hal ini menjadi pertimbangan mengingat mereka memiliki tugas-tugas domestik yang harus dilakukan sebagai seorang istri dan atau ibu.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, secara garis besar permasalahan pokok perempuan pengusaha dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- a) Kurangnya akses informasi pasar dan teknologi

- b) Kurangnya akses permodalan
- c) Kurangnya peningkatan sumberdaya manusia
- d) Kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan
- e) Kurangnya sensitifitas gender di kalangan masyarakat

Melalui sinergi ini seluruh permasalahan yang dihadapi perempuan dalam produktivitas ekonomi, yaitu rendahnya kemampuan, ketidakberdayaan, kurangnya kesempatan, dan kurangnya jaminan dapat diatasi secara bertahap dan berkesinambungan melalui:

- a) Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam sektor pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat
- b) Menumbuh-kembangkan kepedulian pihak-pihak luar pemerintahan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan melalui pembinaan kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil
- c) Pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
- d) Pengembangan model desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRI-MA) dalam upaya pengurangan beban keluarga miskin

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan/kelompok
- b) Program pemberdayaan harus spesifik sesuai kebutuhan kelompok sasaran
- c) Pengembangan kelembagaan keuangan mikro tingkat lokal
- d) Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif
- e) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkesinambungan
- f) Pelibatan keluarga/suami kelompok sasaran
- g) Keterpaduan peranserta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
- h) Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha
- i) Fasilitasi bantuan permodalan untuk pemupukan permodalan wilayah

Peran Perempuan dalam Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bah-

kan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:²³

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengutip Nurhayati (2011), Tri²⁴ menyebutkan definisi UMKM memiliki beragam variasi yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara yaitu:

1. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
2. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang

²³Dani Danuar U. Tri, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

²⁴Dani Danuar U. Tri, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.

4. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufak-turing dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta.
5. Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5-10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta.

Mengutip ADB Report, “*Microenterprise Development: Not by Credit Alone*”, dan “*Empowering Women and Coping with Financial Crisis: An Exploratory Study of Zimbabwean Microenterpreneurs*” dalam SMERU (2003), usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Namun demikian sejumlah kajian di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro berperanan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Di samping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam keluarga.

Sulistiyastuti (2004) dalam Tri,²⁵ menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. *Pertama*, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. *Kedua*, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. *Ketiga*, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. *Keempat*, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat

²⁵Dani Danuar U. Tri, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Di Indonesia, usaha mikro dan usaha kecil telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional. Sebagai gambaran, pada tahun 2000 tenaga kerja yang diserap industri rumah tangga (salah satu bagian dari usaha mikro sektor perindustrian) dan industri kecil mencapai 65,38% dari tenaga kerja yang diserap sektor perindustrian nasional. Pada tahun yang sama sumbangan usaha kecil terhadap total PDB mencapai 39,93% (BPS, 2001). Usaha mikro bersama usaha kecil juga mampu bertahan menghadapi guncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Indikatornya antara lain, serapan tenaga kerja antara kurun waktu sebelum krisis dan ketika krisis berlangsung tidak banyak berubah, dan pengaruh negatif krisis terhadap pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil lebih rendah dibanding pengaruhnya pada usaha menengah dan besar. Lebih jauh lagi, usaha mikro dan usaha kecil telah berperan sebagai penyangga (*buffer*) dan katup pengaman (*safety valve*) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi para pekerja sektor formal yang terkena dampak krisis.²⁶

Menurut Tri (2013), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Rahmana (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-

²⁶Laporan ILO "Dimensi Gender dalam Krisis Ekonomi", bekerja sama dengan Lembaga Demografi UI, dalam SMERU (2003).

sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis.²⁷

Sulistyastuti (2004) berpendapat bahwa UMKM juga mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negaranegara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.²⁸

Forum APEC *Women And The Economy Forum* beberapa waktu yang lalu mengambil tema '*Women As Economic Drivers*'. Pasalnya, 96 persen pelaku kewirausahaan adalah UKM, sementara 60% pelaku UKM adalah perempuan. Dengan melihat kondisi tersebut, perempuan saat ini menjadi penggerak ekonomi atau "*Women as Economic Drivers*" (Suara Karya Online,2013). Demikian juga berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2010) sekitar 60% UKM dikelola oleh perempuan Indonesia. Hal ini tanpa disadari bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Peran perempuan dalam aktivitas ekonomi seperti yang diutarakan Faraz antara lain:²⁹

- a) Memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat
- b) Mengurangi efek fluktuatif ekonomi
- c) Berkontribusi dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan
- d) Menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

²⁷Dani Danuar U. Tri, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

²⁸Dani Danuar U. Tri, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

²⁹Nahiyah J. Faraz, Peran Serta Perempuan dalam UMKM, UNY, 2013.

Kegiatan usaha mikro dan usaha kecil tidak lepas dari peran kaum perempuan. Usaha mikro banyak diminati oleh perempuan dengan pertimbangan bahwa usaha ini dapat menopang kehidupan rumah tangga dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan diri (Sumampouw dalam SMERU, 2003). Meskipun sulit untuk memisahkan peran perempuan dan laki-laki dalam usaha mikro, dan belum ada angka pasti mengenai tingkat keterlibatan perempuan dalam usaha mikro, diperkirakan porsi cukup besar dan sebanding dengan porsi perempuan dalam usaha kecil, yaitu sekitar 40% (Informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan).

Keterlibatan wanita Indonesia dalam kegiatan ekonomi sebagai wirausaha telah ada sejak zaman ke zaman, sejak dulu wanita telah terjun dalam dunia perdagangan, misalnya wanita-wanita daerah pulau Jawa yang memiliki usaha batik dapat membantu ekonomi keluarga, bahkan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dari usaha batik yang mereka kelola. Demikian halnya wanita Sumatera Barat, wanita-wanita sukses mengelola industri rumah tangga berupa kain songket, sulaman, dan lainnya.³⁰

Mengutip pernyataan Priminingtyas, Faraz³¹ menjelaskan bahwa peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikelola secara sungguh-sungguh.

Kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan bertambahnya pendapatan perempuan atau akses perempuan terhadap sumber-sumber daya ekonomi melalui usaha ini, maka kemampuan dan kesempatan mereka bernegosiasi dalam rumah tanggapun mening-

³⁰Febriani, "Peran Wanita dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 3. September 2012 ISSN : 2086 - 5031.

³¹Nahiyah J. Faraz, *Peran Serta Perempuan dalam UMKM*, UNY, 2013.

kat. Posisi tawar mereka berubah dan pendapat mereka mulai diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga. (SMERU, 2003).

Peran serta dan kemampuan wanita dalam pengembangan UKM dapat dibedakan menjadi:³² 1) wanita sebagai pelaku UKM, 2) wanita sebagai pengelola UKM, dan 3) wanita sebagai pembina, pendamping, dan motivator, yang mana dalam peran tersebut diperlukan pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi Kewirausahaan.

Upaya pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh perempuan ini menjadi penting, karena perempuan berhadapan dengan kendala-kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “*triple burden of women*”, yaitu ketika mereka ‘diminta’ menjalankan fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial di masyarakat pada saat yang bersamaan. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan ketrampilan spesifik. Pekerjaan-pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, disamping kondisi kerja yang memprihatinkan serta pendapatan yang rendah.³³

Widowati³⁴ mengungkapkan bahwa keberadaan wirausahawan perempuan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah realitas kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Peran perempuan pelaku usaha mikro dalam perekonomian Indonesia lambat laun ternyata makin menjadi “penjaga gawang” perekonomian rakyat. Data kepemilikan UMKM menunjukkan secara rinci bahwa sebanyak 44,29%

³²Febriani, “Peran Wanita dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 3. September 2012 ISSN : 2086 - 5031.

³³Kerjasama Lembaga Penelitian SMERU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Buku II: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya, Makassar) DESEMBER 2003. http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/buku_2_usaha_mikro_edited_0.pdf.

³⁴Widowati, Indah, Peran Perempuan dalam Mengembangkan *Entrepreneur*/Wirausaha: Kasus di KUB (*Joint Business Group*) Maju Makmur Kec. Kejajar kab. Wonosobo, 2012.

usaha mikro dikelola oleh perempuan, demikian pula di sektor usaha kecil sebanyak 10,28% (BPS, 2005). Sedangkan, laporan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Oktober, 2007) menyatakan bahwa 60% dari 41 juta pengusaha mikro dan kecil di Indonesia adalah perempuan.

Kesimpulan

Perempuan sebagai pelaku usaha tetap dihadapkan pada peran dan tanggung jawab utamanya di ranah domestik, padahal pengembangan usaha mau tidak mau berurusan dengan ranah publik. Keterlibatan perempuan dalam dunia wirausaha dari tahun ke tahun meningkat cukup tajam dan menunjukkan kemampuan yang signifikan dengan membangun dan mengembangkan kewirausahaan. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor usaha yang banyak dikelola oleh perempuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan kegiatan usaha ini tidak lepas dari peran besar kaum perempuan.

Kiprah perempuan dalam ekonomi keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional khususnya pengembangan ekonomi negara, termasuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan membangun kemitraan global dalam pembangunan terutama dengan mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.

Daftar Pustaka

- Aktaria, dkk., "Ketimpangan Gender dalam Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 13 No. 2. 2012.
- Ali, Moh., "Peranan Perempuan dalam Ekonomi Global: Refleksi terhadap Gerakan Gender di Indonesia", *Musawa*, Vol. 1. No. 2. Desember 2009.
- Ardhanari, dkk., "Analisis Personal dan Struktural PUMIK (Perempuan Pengusaha Mikro) di Surabaya dalam Upaya Pengembangan Keberhasilan Usaha Bidang Ritel", *Makalah* disampaikan pada Lokakarya Regional: Pengembangan Kewirausahaan Perempuan dalam Usaha Mikro & Kecil, Bali, 29-30 November 2007.

- Bina Mitra Usaha Nusantara, Lokakarya MAMPU FASE 2 Program Akses terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak Grand Swiss-bell Hotel. Medan 18 Januari 2013.
- Business Conference (BC), Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP. UPN "Veteran" Yogyakarta, 6 Desember 2012. 9-ISBN 978-602-17067-0-1
- Faraz, Nahiyah J. Peran Serta Perempuan dalam UMKM, UNY, 2013.
- Febriani, "Peran Wanita dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 3. September 2012 ISSN : 2086 - 5031
- Harahap, Rahmi Fuji Astuti, Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, 2014.
- Heryanto, Januar, "Pro dan Kontra Ekonomi Global", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 6. No. 2. September 2004. <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>.
- Jati, Waluya, "Analisis Motivasi Wirausaha Perempuan (Wirausahatawati) di Kota Malang", *Jurnal Humanity*, Volume IV. Nomor 2. Maret 2009: 141-153.
- Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Diakses pada tanggal 1 Maret 2016. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/125664-%5B_Konten_%5D-Konten%20C8669.pdf
- Keegan, W. J. Manajemen Pemasaran Global (Jakarta: Prenhallindo, 1974).
- Kerjasama Lembaga Penelitian SMERU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Buku II: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya, Makassar) DESEMBER 2003. http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/buku_2_usaha_mikro_edited_0.pdf
- Republika, Jumlah Pengusaha UMKM Perempuan Meningkat (2015), diakses pada tanggal 01 Maret 2016. (<http://www.smartbisnis.co.id/content/read/berita-bisnis/umum/jumlah-pengusaha-umkm-perempuan-meningkat>)
- Tri, Dani Danuar U., "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang", *Skrripsi* (Se-

marang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

Widayanti, dkk. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender", *Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Vol. 5 Oktober 2013 Bandung, 8-9 Oktober 2013. ISSN: 1858-2559

Widowati, Indah, Peran Perempuan dalam Mengembangkan *Entrepreneur/Wirausaha*: Kasus di KUB (*Joint Business Group*) Maju Makmur Kec. Kejajar kab. Wonosobo, 2012.